

# Golkar Legawa Lepas Sultan

Forum komunikasi lintas partai akan menggelar pertemuan pada akhir Februari.

**YOGYAKARTA** — Partai Golkar legawa jika Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X melepaskan diri dari atribut kepartaiannya demi kepentingan yang lebih besar. Akhir Februari nanti, Golkar menyelenggarakan sebuah forum komunikasi lintas partai.

“Ya, mau bagaimana lagi jika itu jalan terbaik. Kami hormati karena ini masalah yang lebih prioritas bagi kelangsungan DIY kelak,” kata Gandung Pardiman, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar DIY, kepada *Tempo* sesuai pelantikan pengurus Golkar se-Kabupaten Bantul kemarin.

Posisi Sultan di Golkar, diakui Gandung, menjadi sebuah “keistimewaan” tersendiri. Meski Golkar tidak

menjadi pemenang dalam pemilu legislatif atau eksekutif di DIY, citra Sultan sebagai pengayom partai begitu kuat. Ketika ditanya apa tak khawatir suara Golkar akan anjlok pada Pemilu 2014, Gandung menjawab diplomatis. “Golkar besar karena rakyat.”

Gandung, yang tercatat sebagai anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat, juga mengatakan dukungan Golkar terhadap penetapan Sultan bukan semata-mata karena hubungan kepartaian. Golkar melihat, secara tradisi, Sultan mendapat kepercayaan dari masyarakat DIY secara turun-temurun. “Ini suara rakyat. Kita harus hormati.”

Golkar melihat tradisi itu telah menghasilkan sebuah tatanan yang terjaga. “Yang kita nikmati adalah terajanya pluralisme di DIY. Masalah penetapan sudah final, sekarang kita siap mengawal terwujudnya substansi lain soal keistimewaan

ini,” kata dia.

Akhir Februari nanti dijadwalkan Golkar bersama partai politik lain akan melakukan pertemuan untuk membahas langkah-langkah dalam memperjuangkan substansi keistimewaan, selain soal penetapan. Di antaranya masalah pertanahan, tata ruang, pendidikan, budaya, dan kebijakan daerah. Pertemuan itu rencananya juga dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Ketua DPD Golkar Bantul Agus Subagyo melihat mundurnya Sultan dari partai harus disikapi dengan melihat dampaknya terhadap rakyat. “Kami tetap konsisten pada penetapan. Yang harus tak lupa dipikirkan, bagaimana substansi keistimewaan itu nanti dirasakan masyarakat. Kami siap kawal agar tak melenceng,” katanya.

Sultan sendiri hingga kini belum menentukan sikap akan mundur atau tetap ada di Golkar. “Saya lihat

kondisi di pusat (konstelasi politik) seperti apa dulu,” kata dia. Sultan juga tak akan mencampuri soal wacana yang bergulir di DPR.

Sementara itu, Ketua Sekretaris Bersama Pro-Penetapan Widihasto Wasono Putro mengaku menerima laporan dari jaringannya dan masyarakat yang didatangi petugas survei sebuah lembaga survei nasional tentang keistimewaan DIY, yang pertanyaannya tendensius, seperti apakah Anda setuju pemilihan langsung atau pemilihan melalui DPRD DIY.

Menurut Widihasto, petugas tersebut mendatangi masyarakat dan membacakan berkas, yang kemudian diisi sendiri oleh petugas survei. Karena itu, Hasto meminta agar aktivitas itu dihentikan. “Ini merugikan masyarakat Yogya,” katanya. Dia bahkan meminta elemen propene-tapan menyita berkas tersebut. ● **PRIBADI WICAKSONO | BERNADA RURIT**

## KILAS

### MUI Minta Pemerintah Tertibkan Aliran Sesat

**SEMARANG** — Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah meminta pemerintah dan aparat keamanan menertibkan aliran atau ajaran sesat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Permintaan itu disampaikan sebagai salah satu hasil rekomendasi Musyawarah Daerah MUI Jawa Tengah kemarin.

“Selain menertibkan penganut aliran sesat, pemerintah dan aparat keamanan diimbau memberi bimbingan agar mereka kembali ke jalan yang benar sesuai akidah Islam,” ujar Ahmad Rofiq, Sekretaris MUI Jawa Tengah. ● **ROFIUDDIN**

### Tim Inventarisasi Wayang Radya Pustaka

**SURAKARTA** — Sejumlah budayawan merekomendasikan lima nama untuk menginventarisasi koleksi wayang Radya Pustaka. Mereka adalah mantan Rektor Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta Soetarno, dalang Ki Manteb Sudarsono, dosen Universitas Sebelas Maret Bambang Irawan, pemerhati tatak panggung wayang Pelok Trisno Santoso, dan mitra museum Surakarta, Teguh Prihadi.

Budayawan S.T. Wiyono menyebutkan bahwa kelimanya memiliki kedekatan emosional dengan Radya Pustaka. Sedangkan guru besar Seni Rupa ISI Surakarta, Darsono, meminta kinerja tim itu tidak dibatasi waktu agar maksimal dan hasilnya valid. ● **LUKKY PRIMARTANTYO**

### Ribuan Pengungsi Merapi Masih di Barak

**SLEMAN** — Sebanyak 5.645 pengungsi lereng Merapi di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, masih tinggal di barak pengungsian. Sebab, *shelter* belum selesai dibangun. “Ada sebagian sudah jadi, tapi warga ingin pindah bersama-sama,” kata Bupati Sleman Sri Purnomo kemarin.

Kini jumlah pengungsi yang tinggal di barak pengungsian Glagaharjo sebanyak 1.522 jiwa, Kepuharjo 2.111 jiwa, Umbulharjo 679 jiwa, dan Wukirsari 1.309 jiwa. Sedangkan *shelter* yang selesai dibangun sebanyak 1.651 unit dari 2.613 unit yang direncanakan. Dari jumlah itu, *shelter* yang sudah dihuni sebanyak 657 unit. Jumlah pengungsi yang tinggal di barak Plosokerep sebanyak 101 keluarga, Kuwang 109 keluarga, Gondang I 140 keluarga, Kethingan 26 keluarga, dan Banjar Sari 281 keluarga. ● **MUH SYAIFULLAH**

## Sepetak Sawah di Perempatan Jalan

**S**iang itu, Sutarno kebagian giliran menyiram tanaman padi milik bersama, yang sebulan lagi panen. Dengan slang kecil, dia mengalirkan air ke petak sawah, persis di perempatan jalan Desa Cinyawang, Kecamatan Patimuan, Cilacap.

Setahun belakangan, menyirami sawah menjadi kegiatan rutin Sutarno. Meski tidak lazim, toh padi itu tumbuh subur. “Kami sudah dua kali panen, sebulan lagi panen lagi,” kata Sutarno, yang juga ketua RT setempat.

Menanam padi di perempatan jalan itu bukan tanpa alasan. Sawah berukuran 3 x 5 meter tersebut sengaja dibuat sebagai aksi protes rusaknya jalan yang tak kunjung diperbaiki. Bagi mereka, tanaman padi sebagai simbol protes keras.

Menurut Salim, penduduk setempat, jika hujan turun, perempatan jalan itu penuh lumpur seperti sawah. “Buktinya saat ditanami padi bisa tumbuh,” kata dia. Hasil sekali panen bisa mencapai



Sepetak sawah di Desa Cinyawang, Cilacap, ditanam warga sebagai aksi protes jalan rusak. Sawah itu sudah panen dua kali, tapi jalan itu belum diperbaiki.

35 kilogram gabah. Gabah tersebut dijual untuk tambahan membeli aspal jika jalan itu tak kunjung diperbaiki. Untuk merawat tanaman padinya, warga bergiliran menyiram bila hujan tak turun.

Protes kerusakan jalan sepanjang 20 kilometer itu bukan tanpa

alasan. Jalan nasional yang menghubungkan Jawa Tengah dengan Jawa Barat tersebut kondisinya rusak parah. Berdasarkan penelusuran *Tempo*, terlihat jalan itu bak sungai kering. Tak layak disebut jalan nasional.

Di sepanjang jalan, terpampang

poster berisi kecaman terhadap pemerintah. Jalan berlubang sedalam sekitar 40 sentimeter itu juga menjadi penyebab mogoknya sopir dan awak angkutan rute Cilacap-Pangandaran.

“Selain jarak tempuh menjadi lama, mobil cepat rusak,” kata Agus, sopir bus Cilacap-Pangandaran. Jika kondisi jalan bagus, kata Agus, waktu tempuh Sidareja-Pangandaran hanya sekitar satu jam. Tapi saat ini bisa mencapai dua jam.

Pemerintah berjanji memperbaiki jalan tersebut bulan depan. “Pelapisan akan dilakukan Maret ini,” kata Suwito, Kepala Balai Pelaksana Teknis Dinas Bina Marga Jawa Tengah wilayah Cilacap, saat dimintai konfirmasi.

Menurut dia, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 2,9 miliar untuk pelapisan jalan di wilayah itu. Perihal tanaman padi sebagai wujud protes warga tersebut, dia mengatakan, “Tidak akan dicabut sebelum ada perbaikan.” ● **ARIS ANDRIANTO**

## Menafsir Keistimewaan dari Wasiat Sultan HB IX

**YOGYAKARTA** — Situasi Indonesia beberapa bulan pasca-proklamasi kemerdekaan tak jelas. Kepentingan internal dan eksternal mengancam nasib “bayi” yang baru lahir itu. Dalam ketidakjelasan tersebut, Ngayogyakarta Hadiningrat, yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX, hadir melakukan penyelamatan agar “orok” itu tetap hidup, bertahan, dan berumur panjang.

Sejarawan yang juga dosen Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Dr Baskara T. Wardaya, SJ, menyatakan hal itu dalam peluncuran buku *Wasiat HB IX, Yogyakarta Ko-*

*ta Republik*, di Ndalem Yudonegaran, Yogyakarta, kemarin. Berdasarkan hasil studi literasi tersebut, dia memaparkan bahwa saat itu Indonesia dijepit kepentingan internal dan eksternal yang sangat kuat.

Secara internal, dalam kepemimpinan RI, ada tiga kelompok yang menonjol dan saling bergesekan, yakni Soekarno-Hatta, Amir-Syahri, dan kelompok Tan Malaka. Secara eksternal, kelahiran proklamasi menyisakan kenyataan: Belanda masih ingin kembali dan menguasai. Inggris, yang seharusnya netral, justru membantu NICA berkuasa. Dan

Jepang, yang sudah menyerah kepada sekutu, masih ada di Indonesia dengan anggota militer lengkap.

Menurut Baskara, hal itulah yang membuat nasib Indonesia terancam. Dalam kondisi demikian, Sultan Hamengku Buwono IX masuk dan menawarkan diri agar untuk sementara pusat pemerintah dipindah ke Yogyakarta. “Jadi DIY tak hanya lebih tua dari Indonesia, tapi menjadi ibu yang merawat kelahiran pertamanya. Fakta sejarah ini harus dilihat pemerintah saat ini,” kata Baskara.

Buku yang diterbitkan Galang

Press setebal 244 halaman itu ditulis mantan penulis pidato Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Sudomo Sunaryo, bersama anak kandungnya yang juga peneliti kebudayaan, Harryadi Baskara.

Selama 36 tahun Sudomo menjadi penulis pidato, Hamengku Buwono IX memiliki ciri khas kepemimpinan “dhuapak bujang esem bupati sasmita narendra”, yakni pesan tidak harus disampaikan secara harfiah. Dalam senyuman dan simbol, terkandung pesan lebih banyak daripada sebuah tulisan.

● **PRIBADI WICAKSONO**